

COMPARISON OF THE CONCEPT OF PANCASILA DELIBERATIONS AND CONSENSUS AND HABERMAS' THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION IN DEMOCRATIC DISCOURSE

Perbandingan Konsep Musyawarah-Mufakat Pancasila dan Teori Tindakan Komunikatif Habermas dalam Wacana Demokrasi

Sitti Aaisyah^{1a(*)} Muhammad Fahmi Basyah Fauzi^{2b}

¹ School of Information Systems, Bina Nusantara University, Jakarta

² Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Bosowa, Makassar

^a sitti.aaisyah@binus.ac.id

^b m.fahmi@universitasbosowa.ac.id

(*) Corresponding Author sitti.aaisyah@binus.ac.id

How to Cite: Sitti Aaisyah (2024). Perbandingan Konsep Musyawarah-Mufakat Pancasila dan Teori Tindakan Komunikatif Habermas dalam Wacana Demokrasi) doi: 10.36526/js.v3i2.4955

Received : 13-12-2024
 Revised : 09-01-2025
 Accepted : 28-01-2025

Keywords:

Pancasila,
 Democracy,
 Consensus Through
 Deliberation,
 Communicative
 Action,
 Habermas

Abstract

This study aims to analyze the comparison between the concept of deliberation-consensus in Pancasila and the theory of communicative action from Jürgen Habermas. These two approaches offer different perspectives on democratic practice, where consensus is rooted in the values of collectivity and local Indonesian wisdom, while communicative theory of action is oriented towards a rational discourse that is universal. The research uses a philosophical comparative analysis method, focusing on the basic principles, normative foundations, and practical relevance of the two concepts in the context of modern democracy. The results of the study show that consensus prioritizes consensus based on the values of togetherness, but faces challenges in its application in pluralistic societies that tend to experience polarization. In contrast, communicative action theory emphasizes rational dialogue and inclusivity, but often pays little attention to the local cultural aspects that underlie decision-making in Indonesia. This study also identifies the potential synergy between the two concepts, especially in building more participatory and contextual democratic practices in Indonesia. This research makes a theoretical contribution to the study of democracy and political communication, and offers practical insights to strengthen the collective decision-making process in society. The implications of this study underscore the importance of integrating local values with a universal approach to creating an inclusive and sustainable democracy.

PENDAHULUAN

Jika dan hanya jika Pancasila adalah Weltanschauung, landasan filosofis, Pancasila adalah alat pemersatu, saya sangat yakin bahwa Indonesia sebagai bangsa dari Sabang sampai Merauke hanya dapat dipersatukan di bawah landasan Pancasila. Dan apa yang Saudara letakkan di atas Republik Indonesia (Pancasila) bukan hanya alat pemersatu, tetapi pada hakekatnya adalah alat pemersatu dalam perjuangan kita untuk menyembuhkan setiap penyakit yang sudah berpuluh-puluh tahun kita perjuangkan, terutama dalam perjuangan melawan Imperialisme. Perjuangan sebuah bangsa, perjuangan melawan Imperialisme, perjuangan kemerdekaan, adalah perjuangan sebuah bangsa yang membawa kekhasan tersendiri. Tidak ada dua bangsa yang jalan perjuangannya sama. Setiap bangsa memiliki metode dan karakter perjuangannya sendiri. Hal ini karena bangsa sebagai individu memiliki karakternya sendiri. Karakter ini diwujudkan dalam situasi tertentu, dalam budaya, ekonomi, alam, dan sebagainya."(Soekarno,

1965).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai utama yang terkandung dalam Pancasila adalah musyawarah-mufakat, yang mencerminkan pendekatan demokrasi berbasis kolektivitas dan kebersamaan. Nilai ini mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harmoni sosial dan keputusan bersama. Menurut Nasution (2017), musyawarah-mufakat mencerminkan kearifan lokal yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui dialog yang inklusif, yang berbeda dari sistem demokrasi liberal yang lebih menonjolkan suara mayoritas.

Demokrasi δημοκρατία (dēmokratía) adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dibentuk oleh kombinasi δῆμος (dēmos) yang berarti "rakyat", dan κράτος (kratos) yang berarti "memerintah". Dalam pengertian ini, demokrasi diartikan sebagai "pemerintahan rakyat", atau dalam kata-kata terkenal Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam kehidupan sosial, sulit untuk mengompromikan berbagai kepentingan anggota masyarakatnya yang notabene adalah individu ataupun kelompok yang berbeda dalam pemikiran, keinginan, kepentingan, dan tujuan hidupnya. Namun, hidup bersama dalam perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Untuk hidup bersama dalam satu komunitas atau Negara tentunya ada tujuan bersama yang ingin dicapai tanpa harus mengorbankan hak-hak mendasar individu di dalamnya. Sebagaimana pandangan Jean-Jacques Rousseau, bahwa dalam kedaulatan, setiap orang adalah merdeka dan memiliki hak yang sama untuk memberikan hak suara. Politik adalah aktivitas kelompok dan atau orang dalam mengarahkan suatu kebijakan,

Namun, dalam praktiknya, kedua pendekatan ini menghadapi tantangan yang signifikan. Musyawarah-mufakat sering kali terhambat oleh dinamika politik dan keberagaman masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Polarisasi politik, konflik kepentingan, dan dominasi kelompok tertentu dapat menghambat tercapainya konsensus yang sejati (Latif, 2011). Di sisi lain, teori tindakan komunikatif cenderung mengabaikan konteks budaya lokal, sehingga sulit diterapkan secara penuh dalam masyarakat yang memiliki tradisi berbeda, seperti di Indonesia (Geertz, 1973).

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas Pancasila dan teori Habermas secara terpisah, tanpa membandingkan kedua konsep dalam kerangka demokrasi. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif prinsip-prinsip musyawarah-mufakat dalam Pancasila dengan teori tindakan komunikatif Habermas. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk memperkuat demokrasi yang kontekstual dan inklusif di Indonesia.

Paturan dan tujuan dalam lingkup kehidupannya, apakah dalam bernegara atau dalam lingkungan sosial. Menurut John Stuart Mill, tujuan politik adalah untuk mewujudkan perubahan menuju arah yang lebih baik dan satu bentuk pendidikan untuk para anggotanya. Kondisi politik yang sehat turut memengaruhi kualitas demokrasi, yaitu yang menyaratkan partisipasi aktif dari setiap warga negara. Untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi, masyarakat harus bertindak bersama dengan elemen-elemen negara lainnya, seperti partai politik, pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, dlsb.

Sayangnya, sering kali rakyat hanya menjadi objek dari aktivitas politik dalam suatu sistem demokrasi. Keberadaannya diperhitungkan semata sebagai objek dan angka dalam Pemilu namun tidak mengandung kekuatan elementer untuk perubahan. Politik transaksional yang lumrah terjadi di alam demokrasi menjadikan kekuatan oligarki berubah menjadi kelompok otoritarian yang memanfaatkan keluguan rakyat.

Karakter masyarakat Timur, khususnya Indonesia, yang cenderung terikat dengan tradisi dan ikatan komunal ikut memberi warna khas dalam berdemokrasi. Corak tersebut cenderung berbeda dari masyarakat Barat yang cenderung mandiri dan individualis serta tidak terikat kuat dengan lingkungan komunalnya dalam mengekspresikan pandangan politiknya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pokok bahasan musyawarah-mufakat dalam Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia dengan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas dalam diskursus demokrasi.

METODE

Tulisan ini adalah sebuah kajian analitis dan komparatif atas dua pemikiran Barat dan Timur yang direpresentasikan oleh teori tindakan komunikatif Habermas dan konsep musyawarah-mufakat Pancasila dalam diskursus demokrasi. Selain melakukan analisa filosofis atas kedua pemikiran, keduanya lalu dikomparasikan untuk melihat aspek positif dan negatif dari keduanya tanpa terjebak ke dalam penilaian yang hierarkis, seperti yang lebih utama atau trivial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Musyawarah-Mufakat dalam Pancasila

Musyawarah-mufakat atau musyawarah dan mufakat merupakan salah satu prinsip dari lima sila Pancasila yang terkait dengan sistem demokrasi di Indonesia. Untuk menjelaskan konsep musyawarah-mufakat dalam sistem nilai Pancasila, perlu dijelaskan prinsip-prinsip lain karena prinsip-prinsip tersebut saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing prinsip mendasari prinsip-prinsip lainnya dan menciptakan satu kesatuan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai suatu ideologi negara menjadikan Indonesia sebagai suatu negara dengan karakternya yang khas.

Pancasila adalah dasar filosofis atau pandangan hidup bangsa Indonesia (*weltanschauung*) serta ideologi negara. Melalui proses panjang dan diskusi yang intens, para pendiri bangsa berhasil merumuskan nilai-nilai utama yang terinspirasi dari kepribadian dan budaya masyarakat yang beragam. Soekarno menyatukan lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti lima dan sila berarti landasan atau dasar.

Menurut Soekarno, gagasan tersebut bukan hasil pemikirannya sendiri, melainkan merupakan karakter masyarakat yang sudah ada ratusan tahun sebelum Indonesia berdiri sebagai negara dan bangsa. Adapun menurut Notonagoro, Pancasila dapat dianggap sebagai filsafat rakyat Indonesia karena didukung oleh landasan teori kausalitas Aristotelian. Berdasarkan prinsip kausalitas, semua keberadaan mempunyai alasan. Ada empat alasan dalam teori kausalitas, yaitu *causa materialis*, *causa formalis*, *causa finalis*, dan *causa efficiens*.

Pancasila dapat dipahami dengan menggunakan teori tersebut. Penjelarasannya adalah sebagai berikut. Pertama, yang menjadi *causa materialis* Pancasila adalah adat-istiadat, budaya, dan kepercayaan yang telah lama ada di Indonesia. Tradisi-tradisi inilah yang terekam dalam ingatan masyarakat sampai hari ini dan diwariskan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya melalui sastra dan lisan, atau juga melalui artefak-artefak kebudayaan dan masih terus hidup sampai hari ini. Kedua, yang menjadi *causa formalis* Pancasila adalah pemikiran-pemikiran awal tentang ideologi pendirian Indonesia merdeka dari Sukarno, Hatta, Yamin, dan para pendiri negara lainnya yang berasal dari berbagai golongan yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan enam puluh sembilan orang (BPUPKI). Setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap semakin tidak kooperatif dan jauh dari kepentingan Jepang, lalu dibentuk lagi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berjumlah dua puluh satu orang sebagai representasi dari beberapa wilayah yang penting pada masa itu. Ketiga, yang menjadi *causa finalis* Pancasila adalah Pancasila menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, yaitu *causa efficiens* Pancasila adalah UUD 1945 yang secara resmi diawali oleh panitia PPKI, khususnya Soekarno dan Hatta yang berkontribusi maksimal dalam menyusun Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang lalu diresmikan dan menjadi dokumen resmi yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan juga memuat pernyataan sikap bahwa Indonesia adalah negara merdeka (Suwarno, 1993).

Untuk memahami Pancasila sebagai pandangan dunia (*worldview*) Indonesia, perlu dipahami bahwa setiap sila saling terkait satu dengan yang lainnya. Sila pertama menyangkut keimanan masyarakat Indonesia akan adanya *Causa Prima*, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dan mengatur seluruh kehidupan di muka bumi. Sejak dahulu hingga Indonesia merdeka, pengaruh berbagai agama sangat terasa dalam membentuk kebudayaan orang Indonesia. Di Nusantara, sejak ribuan tahun yang lalu terdapat pengaruh agama lokal yang berbentuk animisme dan dinamisme, sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, sekitar 7 abad pengaruh agama Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh agama Kristen.

Penerimaan dan ketundukan manusia pada Tuhan telah membentuk kepribadian manusia Indonesia. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia yang merdeka dengan berdasar pada prinsip ke-Tuhanan yang berkebudayaan, berbudi pekerti yang luhur, dan hormat-menghormati satu sama lain. Menurut Yudi Latif, proposisi tentang Indonesia yang bukan merupakan Negara sekuler dan bukan pula merupakan Negara agama dikontekstualisasikan dalam konsepsi "diferensiasi" yang maju, karena berdasarkan dengan nilai ketuhanan dalam Pancasila yang menjadi "fusi" dan "separasi". Artinya, sistem sekulerisme tidak dapat menyudutkan agama ke ruang privat sebab Pancasila adalah konsensus publik yang menginginkan agar nilai-nilai ketuhanan dijadikan dasar kehidupan publik dan politik. Akan tetapi, Pancasila juga tidak menghendaki perwujudan Negara agama yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan tertentu sebab keniscayaan agama dan aliran keyakinan yang plural di Indonesia.

Walaupun Islam adalah agama mayoritas, bukan berarti agama Islam menjadi dasar negara. Ada kebebasan

beragama bagi mereka yang menganut kepercayaan lain, termasuk bagi yang agnostik atau ateis. Pancasila lebih berfokus pada moralitas publik dan tidak mengatur keyakinan pribadi. Peran agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia tetap penting karena, secara historis, agama-agama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara dan berperan signifikan dalam perjuangan serta pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa. Maka menurut Notonagoro, "Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat/Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (Soekarno, 1965).

Sila kedua menekankan aspek kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai etis ketuhanan. Menurut Muhammad Hatta, "pengakuan terhadap dasar ketuhanan yang Maha Esa mengajak manusia untuk menciptakan harmoni di alam, yang diwujudkan dengan membangun persahabatan dan persaudaraan antar manusia dan bangsa" (Latif, 2011). Konsep kemanusiaan ini tidak dibatasi oleh garis perbatasan negara, tetapi melampaui batas-batas tersebut. Nilai kemanusiaan yang dijunjung adalah kemanusiaan yang bersifat universal. Soekarno menyatakan bahwa "kebangsaan yang kita usulkan bukanlah kebangsaan yang eksklusif atau bersifat chauvinisme, melainkan kebangsaan yang mengarah pada persaudaraan antarbangsa."

Indonesia yang mengalami penjajahan selama berabad-abad oleh kolonialis dan imperialis memperoleh pelajaran penting untuk menolak segala bentuk penjajahan yang merusak tatanan kehidupan dan merendahkan martabat manusia. Semangat nasionalisme berkembang seiring dengan semangat kemanusiaan dan egalitarianisme. Prinsip persaudaraan universal menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan hak sosial (kolektif), menjadi dasar bagi pembangunan negara-bangsa yang humanis. Dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, muncul komitmen untuk mewujudkan persaudaraan yang melampaui batas lokal, nasional, regional, hingga mencapai persaudaraan antar manusia dan antar bangsa di tingkat global. Semangat ini berujung pada keyakinan bahwa negara yang tidak menghargai hak asasi manusia bukanlah negara yang beradab dan tidak layak dihormati.

Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, merupakan komitmen untuk merawat keragaman sebagai sebuah keniscayaan bangsa Indonesia. Ada sekitar 500-an etnik mendiami Indonesia, yang hidup mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Itu sebabnya Soekarno mengatakan bahwa Indonesia adalah "rainbow of races" Menyadari realitas dan sejarah yang ada maka Indonesia tidak bisa menjadi Negara suatu bangsa atau etnik tertentu sebab Indonesia hadir dari rajutan berbagai etnik dan bangsa yang beragam. Slogan untuk realitas Indonesia adalah *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya ada beragam budaya dan keyakinan namun tetap dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia (*unity in diversity, diversity in unity*). Keragaman budaya adalah *par excellence* Indonesia yang tidak bisa diubah dan diingkari. Ada silang saling budaya yang melahirkan persamaan dan perbedaan, tidak sering pula menjadi perekat atau ancaman serius untuk sebuah misi persatuan cita-cita kebangsaan. Tidak hanya etnik, budaya, dan keyakinan yang berbeda, namun juga termasuk bentuk geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, di mana ada sekitar

18.108 pulau dengan 6000 di antaranya yang berpenduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan segala kompleksitasnya memiliki tingkat kesulitan manajerial yang juga tinggi.

Menurut Clifford Geertz, Indonesia diibaratkan seperti anggur tua dalam botol baru, yaitu kumpulan masyarakat lama dalam sebuah negara yang baru. Nama "Indonesia" sebagai proyek "nasionalisme politik" memang baru diperkenalkan sekitar tahun 1920-an, namun ia tidak muncul dari ruang kosong. Nama tersebut berakar pada tanah air dan elemen-elemen sosial budaya yang telah hadir di Nusantara selama ribuan tahun.

Sila keempat, yaitu musyawarah-mufakat, dimaknai oleh Yudi Latif sebagai demokrasi permusyawaratan. Ada beberapa nilai budaya lokal yang menjadi landasan bagi demokrasi sosial di Indonesia. Sebelum menjadi negara republik, sistem sosial pada kerajaan-kerajaan di Indonesia adalah sistem feodal. Meski feodal, tanah sebagai faktor produksi utama tidak hanya dimiliki oleh raja, tetapi dimiliki bersama, sehingga setiap orang yang ingin menggunakan tanah harus mendapatkan persetujuan dari komunitasnya melalui mekanisme lembaga adat atau kerajaan.

Musyawarah-mufakat dalam Pancasila mencerminkan budaya kolektif Indonesia yang menekankan pentingnya harmoni sosial dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Proses ini menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu, yang menjadi ciri khas masyarakat dengan tradisi komunal (Latif, 2011). Sebaliknya, teori tindakan komunikatif Habermas berfokus pada dialog rasional, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya dominasi (Habermas, 1984). Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskursus yang inklusif dan setara.

Dengan demikian, tradisi gotong-royong terus berlanjut, membantu sesama anggota komunitas, bahkan dalam urusan pribadi seperti membangun rumah. Kebiasaan ini menciptakan tradisi bermusyawarah dalam

komunitas untuk membahas kepentingan bersama dan mencapai keputusan mufakat.

Menurut Tan Malaka, konsep demokrasi dan kedaulatan sudah berkembang sejak sebelum terbentuknya Indonesia. Kekuasaan raja dibatasi oleh komitmennya terhadap keadilan dan hukum. Dalam budaya Minangkabau, ada pepatah terkenal: "rakyat ber-raja pada penghulu, penghulu ber-raja pada mufakat, dan mufakat ber-raja pada alur dan patut." Ini berarti bahwa jika keputusan raja bertentangan dengan akal sehat dan prinsip keadilan, rakyat berhak menolaknya.

Pada manuskrip kebudayaan lainnya dari jazirah Bugis wilayah tengah Indoneisa, tepatnya sebuah lontara' atau kitab yang diwariskan kerajaan Bone pada masa pemerintahan La Tenrirawe Bongkange, Raja Bone ke-7 (1560-1578). Latoa ini merupakan kumpulan petuah-petuah bijaksana dari raja-raja atau orang-orang bijaksana pada masa itu. Mattulada (1985) mengelompokkan ke dalam tiga kesimpulan umum atas naskah Latoa, yakni (Mattulada, 1985):

1. Manusia itu apapun dan bagaimanapun kedudukan dan derajat sosialnya adalah makhluk yang sama derajatnya di hadapan Tuhan.
2. Manusia itu, dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebaikan.
3. Manusia itu, dalam membangun nilai-nilai dan pranata sosial kebudayaannya selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan kolektif dan kepentingan individunya.

Dalam Latoa dijelaskan bahwa seorang raja haruslah memerintah dengan adil dan kekuasaannya tidak absolute sehingga tidak dapat berbuat tiran kepada rakyatnya. Adat yang berlaku bukanlah sesuatu yang ajeg yang tidak dapat diubah karena jika demikian raja dapat menjadikan adat sebagai alat legitimasi untuk berlaku tiran. Seorang raja hendaknya memiliki spiritualitas, pengetahuan, kepribadian, dan karakter yang unggul sehingga dapat memerintah dengan bijak dan bajik. Ketika kekuasaan raja begitu absolut dan tiran, maka rakyat berhak melakukan protes untuk mengkritisi raja dan atau menyingkir dari daerah kekuasaan raja jika tidak dapat lagi hidup bahagia di wilayah tersebut (Muqsih et al., 2020).

Dari beberapa bahan pemikiran di atas, hal tersebut menjadi pertimbangan para pendiri bangsa dalam menggagas konsep demokrasi Indonesia yang modern. Hatta merumuskan bahwa ada lima anasir demokrasi asli Indonesia, yaitu rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja.

Menurut Yudi Latif (2011), kondisi Negara kepulauan juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi konsep demokrasi sosial ala Indonesia, karena berada di titik strategis persilangan benua dan samudera menjadikan Indonesia terbiasa menerima berbagai arus masuk aneka budaya tanpa hadirnya prasangka negatif atau resisten. Situasi ini menjadi predisposisi psikologis manusia Indonesia untuk menerima perbedaan dan penyerbukan silang saling budaya yang kondusif bagi pengembangan budaya demokrasi (Latif, 2011).

Selain nilai budaya lokal, ajaran Islam juga memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan konsep demokrasi di Indonesia, di mana Islam menjadi keyakinan mayoritas. Sejak masuknya Islam pada abad ke-17, masyarakat mengalami transformasi dari struktur feodal menuju masyarakat yang lebih egaliter. Islam mengajarkan konsep tauhid, yaitu monoteisme, yang menolak kekuasaan absolut di tangan manusia. Dalam konsep ini, hanya Tuhan yang menjadi penguasa tertinggi, dan kekuasaan manusia yang menindas dianggap tidak adil serta bertentangan dengan tauhid.

Logika prinsip tauhid menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang perendahan martabat serta pemaksaan kehendak atau pandangan antar sesama. Bahkan seorang Rasul tidak berhak memaksa, melainkan hanya menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap manusia memiliki kehormatan, hak, kebebasan, dan tanggung jawab moral atas pilihan hidupnya. Prinsip kesetaraan ini juga mendorong manusia untuk menjadi makhluk sosial yang membangun kerjasama dan persaudaraan guna menciptakan kehidupan bersama yang baik.

Pengaruh intelektualisme dan humanisme Barat mulai terasa sejak abad ke-20. Sebuah koran lokal, *Pembrita Betawi*, secara rutin mengangkat isu penyalahgunaan kekuasaan oleh Belanda dan pegawai sipil pribumi melalui kolom "Dreyfusiana." Nama ini terinspirasi dari kasus Dreyfus di Prancis pada abad ke-19, yang memunculkan "manifeste des intellectuals," tonggak gerakan intelektual di Eropa. Ide-ide Revolusi Prancis mengilhami tulisan para aktivis di Indonesia, yang mendorong terbentuknya gerakan sosial, partai politik, dan dewan rakyat (*Volksraad*).

Ideologi komunisme juga berpengaruh kuat dalam pemikiran beberapa tokoh pra-kemerdekaan, salah satunya Tan Malaka. Ia terkesan dengan Revolusi Oktober di Rusia yang berhasil berkat peran Massa Aksi, dan percaya bahwa kaum buruh serta proletar harus mengambil peran lebih besar dalam pemerintahan agar tidak hanya menjadi objek birokrasi yang kerap berpihak kepada pemilik modal. Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka mengusulkan kerjasama antara komunisme dan Pan-Islamisme, serta menolak sistem individualisme dan kapitalisme secara apriori.

Musyawarah-mufakat diterjemahkan sebagai demokrasi sosialistik. Artinya, segala perbedaan pandangan ideologi politik memiliki titik temu dalam gagasan demokrasi kultural yang berangkat dari nilai lokalitas kebudayaan nusantara, yaitu kekeluargaan. Ini artinya segala keputusan dan kebijakan harusnya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan

pribadi atau golongan serta menolak individualistik sebab bertentangan dengan nilai gotong-royong yang menjadi karakter manusia Indonesia.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dianggap benar jika memenuhi empat prasyarat. Pertama, keputusan harus didasarkan pada prinsip rasionalitas dan keadilan, bukan sekadar subjektivitas ideologis atau kepentingan pribadi. Kedua, keputusan tersebut harus mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Ketiga, keputusan harus berorientasi jangka panjang, bukan hanya mengutamakan kepentingan sesaat melalui kompromi transaksional yang merusak (toleransi negatif). Keempat, keputusan harus imparial, melibatkan dan mempertimbangkan pandangan semua pihak secara inklusif, sehingga dapat mencegah dominasi oleh elite penguasa dan pengusaha, serta menghindari klaim sepihak dari mayoritas.

Menurut Soekarno, konsep demokrasi yang tepat untuk Indonesia yang plural adalah sosio- nasionalisme dan sosio demokrasi. Konsep sosio-demokrasi ini dipinjam dari pemikiran seorang Marxis Austria, Fritz Adler yang mendefinisikan sosio-demokrasi sebagai politik ekonomische (demokrasi politik-ekonomi). Maka, untuk Indonesia, demokrasi politik saja tidaklah cukup namun demokrasi ini harus mampu menyelamatkan rakyat dari kemelaratan dan ketertindasan. Sosio- demokrasi tidak sekedar dalam lingkup politik yang memperjuangkan kepentingan satu golongan tertentu namun untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat pada bidang ekonomi, sehingga terwujud keadilan sosial. Maka sila kelima sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi cita-cita akhir revolusi Indonesia yang terkesan utopis namun harus terus diperjuangkan.

Sejak imperialisme Barat memberlakukan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia, kondisi ekonomi rakyat menjadi benar-benar terpuruk. Belanda yang semula hadir di bumi nusantara untuk kerjasama perdagangan berubah menjadi penindas. Di bawah bayang-bayang imperialisme Barat, rakyat tidak hanya terpuruk secara ekonomi namun juga harkat dan martabat kemanusiaannya dirampas. Dengan kondisi yang sedemikian terpuruknya para pemuda terpanggil untuk mengusir penjajah dan mulai memikirkan untuk menghimpun kekuatan bersama, tidak lagi terpecah-pecah dalam kekuatan-kekuatan komunal namun lebih dari itu, yaitu dalam suatu ikatan Negara. Nasib terjajah yang dirasakan sekian lama menyebabkan tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar suku, ras, golongan, dan keyakinan sehingga para pemuda masa perjuangan membulatkan tekad membentuk Negara yang dinamai Indonesia.

Oleh karena itu, setelah menjadi satu bangsa Indonesia, sejarah kalam masa lalu menginspirasi para pendiri bangsa untuk membuat konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Imperialisme dan juga ekonomi liberalisme telah memberi pijakan kepada ekspansi kapitalisme yang hingga hari ini melahirkan neoliberalisme. Neoliberalisme, menurut Chomsky, cenderung menjadi individualisme, memberi kebebasan terlalu banyak kepada individu dan melupakan bahwa individualisme yang bersifat predator juga membawa sumber-sumber penindasan dan ketidakadilannya sendiri.

Maka pelaksanaan musyawarah-mufakat yang sesuai dengan nilai utama Pancasila dalam alam demokrasi adalah dijalankan dengan berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, menjunjung tinggi prinsip untuk memanusiakan manusia, menghargai perbedaan untuk integrasi bangsa, menempatkan tujuan akhir untuk memenuhi rasa keadilan tanpa diskriminatif kepada seluruh rakyat.

Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya menganggap bahwa karakter dasar manusia Indonesia adalah sikap gotong-royong. Gotong-royong merupakan pancaran dari rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan penghormatan antara satu sama lain. Jika berdiri sama tinggi maka duduk pun sama rendah. Ada ungkapan yang berbunyi kurcaci di bahu raksasa bisa melihat keduanya. Artinya, seorang kurcaci dapat melihat dua sisi pada satu bahu raksasa. Jadi, terlepas dari situasi kuat dan lemah atau kaya dan miskin, tanggung jawab atas semua masalah adalah tanggung jawab bersama. Gotong-royong melahirkan sikap mental yang merasakan hidup berkomunitas yang senasib sepenanggungan, bekerja dan berkeringat bersama untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis dan sejahtera. Gotong-royong hadir di antara golongan kaya dan miskin, bangsawan dan rakyat jelata, yang muslim dan yang non muslim, orang Indonesia dan non Indonesia (Soekarno, 1965).

Indonesia sebelum dan sesudah terbentuk adalah berbentuk masyarakat yang heterogen; Ini bukan masyarakat yang didasarkan pada satu ras, budaya, agama, kepercayaan atau gagasan. Gotong-royong sebagai budaya muncul dalam lingkungan seperti itu. Gotong-royong melampaui batas perbedaan. Zygmunt Bauman, seorang pemikir posmodernisme, melihat situasi yang diisi oleh keragaman sebagai suatu perayaan atas perbedaan (Dorahy, 2022).

Jürgen Habermas dan Tesisnya tentang Teori Tindakan Komunikatif

Jürgen Habermas adalah tokoh generasi kedua dari Mazhab Frankfurt yang melanjutkan teori kritis dalam tradisi

Hegelian, yang sebelumnya dikembangkan oleh Adorno dan Marcuse, namun dianggap gagal dan membingungkan. Mazhab Frankfurt mengajukan konsep dialektika pencerahan, yang menunjukkan paradoks bahwa manusia, meskipun dianggap makhluk rasional, tidak akan pernah sepenuhnya mencapai rasionalitas karena bisa terjebak dalam dogma baru (Habermas, 1991).

Ada dua paradigma dalam teori kritis: pendekatan historis dan pendekatan materialis. Realitas sosial dipandang sebagai hasil dari sejarah, dan sejarah itu sendiri diciptakan oleh manusia (*gattungswesen*). Sejarah manusia pada dasarnya adalah sejarah penindasan. Banyak bentuk penindasan yang disembunyikan, sehingga realitas tampak wajar dan objektif. Tugas teori kritis adalah membuka tirai ideologis dan mengungkap penindasan yang tersembunyi untuk menciptakan pencerahan baru (Smethurst et al., 2024). Teori kritis memandang sejarah sebagai alat untuk mencapai perubahan praksis.

Mazhab Frankfurt berpendapat bahwa pencerahan sejati hanya dapat dicapai melalui refleksi diri. Manusia modern menyadari bahwa tradisi dan dogmatisme menindas dan memanipulasi kenyataan. Untuk menghadapi kenyataan ini, dikembangkanlah bentuk rasionalitas yang menekankan pada kontrol dan dominasi terhadap alam dan manusia, dengan tujuan mencapai efektivitas, efisiensi, dan hasil maksimal—prinsip yang mendasari positivisme. Namun, pada era modern yang menghasilkan kapitalisme, positivisme, dan teknokrasi, manusia justru terjebak dalam dogma-dogma baru yang diciptakannya sendiri. Perubahan dalam bentuk kesadaran dan praktik kehidupan sering kali hanya menggantikan bentuk penipuan diri dan penindasan dengan bentuk-bentuk baru.

Pemikiran teori kritis Mazhab Frankfurt yang dengan lantang mengkritisi paham-paham apapun karena potensinya menjadi dogma baru ditinggalkan oleh pemikir-pemikir setelahnya. Teori kritis dianggap membingungkan dan tidak memiliki tujuan pemikiran yang pasti atau posisi keberpihakan yang jelas. Meski demikian, Habermas lalu melanjutkan teori kritis ini dan mengembangkannya menjadi teori tindakan komunikatif. Sebelumnya pada tahun 1960-an, Habermas mengembangkan teori jaringan, namun kemudian ia lebih fokus pada kajian etika komunikasi dalam tradisi Immanuel Kant dan menyintesiskannya dengan cara pandang Marxist serta tradisi Hegelian.

Habermas lulus dari Sekolah Frankfurt dengan disertasinya berjudul *The Structural*

Transformation of the Public Sphere: An Investigation into a Category of Bourgeois Society. Karyanya ini kemudian yang paling banyak dibaca hingga hari. Dalam karyanya ini ia menjelaskan tentang konsep borjuis dalam ruang demokrasi yang baginya adalah tidak lebih dari sekedar perubahan hubungan jual-beli dalam ranah politik. Kaum borjuasi selalu berhasil dengan memainkan perannya untuk menipu kelompok yang lemah dengan menggunakan tampilan yang baru.

Pertama-tama ia menjelaskan tentang ruang publik sebagai ruang dari pribadi-pribadi yang berkumpul bersama untuk membentuk sebuah "publik". Ruang publik adalah konsep yang digunakan dalam teori sosial modern untuk menunjuk pada area aktivitas sosial bersama di mana pemikiran, wacana, dan tindakan yang bertujuan untuk menentukan dan mewujudkan kebaikan bersama masyarakat diproduksi dan dikembangkan. Di dalam ruang publik seluruh domain dari kehidupan sosial kita termasuk opini publik dapat dibentuk. Dalam prinsipnya, yang dapat mengakses ruang publik adalah seluruh warga Negara. Tindakan warga Negara sebagai masyarakat ketika mereka berurusan dengan berbagai hal yang umum terjadi di lingkungannya, dengan kesetaraan dan kebebasan yang melekat pada individu, membuat mereka menyampaikan pendapatnya dengan bebas (Habermas, 2020).

Habermas merujuk pada abad pertengahan sampai abad ke-18 dimana ruang publik borjuis adalah representasi dari kemasyarakatan. Raja adalah satu-satunya orang publik dan yang lain adalah penonton. Kenyataan antara yang publik dan privat tidak terpisahkan. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi menjadi hal vital pada perubahan ruang publik, khususnya dalam bentuk produksi kapitalis dan perdagangan jarak jauh. Berita dan komoditas sangat mempengaruhi perubahan ini. Informasi mempengaruhi pikiran masyarakat dan kemudian berkembanglah berbagai jenis pertukaran komoditas yang berdampak pada aktivitas ekonomi.

Pada abad ke-18, rasionalitas digunakan sebagai alat untuk menyampaikan argumen yang logis dan kritis di ruang publik. Perdebatan rasional-kritis dilakukan oleh masyarakat pembaca borjuis dalam hal merespons literatur. Debat diselenggarakan di ruang besar (salon) atau di kedai-kedai kopi. Pada masa tersebut terjadi pergeseran konsep borjuis, yaitu kaum borjuis tidak hanya mereka yang menguasai tanah (feodal) dan kelompok penguasa (aristokrat), melainkan mereka juga yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik (golongan intelektual).

Ketika sistem kapitalisme semakin menguat dalam kehidupan sosial, garis batas antara Negara dan masyarakat menjadi kabur dan terjadi refeodalisasi. Yang dimaksud dengan refeodalisasi adalah proses yang berlangsung di dalam Negara dengan mengadopsi sistem feodal. Refeodalisasi melibatkan penggabungan negara dan masyarakat, publik dan

swasta yang mendekati kondisi negara feodal. Negara di alam modern meski memiliki ruang publik yang semakin banyak namun tampak elemen-elemen dan prinsip yang berlangsung di dalamnya kembali meniru sistem feodal abad pertengahan.

Kunci utama dalam ruang publik adalah debat yang rasional dan kritis. Yang terjadi pada alam Negara modern adalah pertemuan di ruang publik dilakukan pada waktu luang (*leisure time*) dan individu tidak lagi hadir sebagai masyarakat pemilik properti atau peduli dengan situasi politik yang dapat berdampak bagi kehidupannya. Perkembangan media massa semakin memperkeruh keadaan dimana berita dan informasi dimanipulasi dan dijadikan konsensus bersama. Ini adalah bukti partikular dalam politik modern, yang menunjukkan berkembangnya disiplin-disiplin baru seperti pengiklanan dan hubungan masyarakat. Ruang publik mengambil alih sebuah aspek feodal, yaitu para politikus menghadirkan dirinya sebagai *public figure* untuk mempengaruhi pendapat masyarakat. Di sini masyarakat hanya sebagai penonton yang menerima berbagai pengetahuan dan opini dari publik. Tuntutan pasar dan aktivitas dalam waktu yang cepat menuntut para pelakon ruang publik berusaha melakukan pengaburan kebenaran demi terwujudnya kepentingannya. Opini publik dimanipulasi sedemikian rupa sedang masyarakat kehilangan kritisisme dalam melacak argumen kebenaran opini.

Pada kehidupan modern, kemajuan sains dan teknologi turut mempengaruhi cara pandang manusia. Dalam penjelasan teori kritis, yang terjadi dalam kehidupan modern adalah lahirnya berbagai patologi yang menjadikan manusia modern teralienasi dari makna. Bagi Habermas, pangkal segala kebingungan dan krisis dalam modernitas adalah kesalahpahaman mengenai rasionalitas. Rasionalitas dalam era modern dipandang sebagai kebangkitan positivisme yang kemudian berkompetisi dengan rasionalitas ilmu alam. Setelah itu, tercipta sebuah struktur dan sistem di masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan politik ekonomi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan sistem kapitalisme. Menurut Habermas, faktor ekonomi sangat erat hubungannya untuk menjelaskan berbagai krisis yang terjadi di masyarakat. Sebab, berbagai bentuk pertanyaan tentang bagaimana dinamika sistem ekonomi sangat mempengaruhi berbagai perintah yang secara normatif terintegrasi dalam masyarakat. Akhirnya ekonomi saat ini menjadi sebuah subsistem dalam struktur masyarakat sehingga keseimbangan ekonomi sangat berkaitan dengan persoalan pilihan rasional masyarakat (Habermas, 1984).

Hubungan kehidupan modern dan rasionalitas adalah sangat penting, sebab jika rasionalitas berjalan sesuai dengan normatifnya, maka modernisasi akan menjamin integrasi kebudayaan, masyarakat, dan sosial. Tidak seperti pandangan post-modernisme yang terjebak dalam paham nihilisme yang menafikkan berbagai nilai. Tujuan utama Habermas dalam teori komunikasi adalah untuk menjelaskan bagaimana kekuatan komunikasi pada diskusi ruang publik dapat berkembang dan menentukan kekuatan administratif dan atau sebaliknya. Di sini bangunan teoritis Habermas mengembangkan model sirkulasi kekuatan politik dimana modernitas adalah kenyataan yang harus diterima tanpa harus teralienasi dari hakikat hidup (Christensen, 2024).

Untuk mengatasi berbagai patologi di era modern dan dampak negatif yang dihasilkan oleh modernisasi dalam masyarakat kapitalis, Habermas mengajukan teori tindakan komunikatif. Teori ini juga dikembangkan dari pandangan sosiolog Max Weber tentang rasionalitas dalam tindakan, sikap hidup, dan pandangan dunia. Habermas ingin mempertahankan aspek normatif modernitas, seperti rasionalisasi budaya, masyarakat, dan kepribadian, melalui rasio komunikatif. Baginya, rasionalitas terletak dalam tindakan komunikasi yang memperluas cakupannya ke berbagai bidang kehidupan (Forchtner, 2021). Dalam komunikasi, rasionalitas tercermin dalam berbagai bentuk argumentasi yang memungkinkan kelangsungan dialog, menciptakan makna yang beragam.

Habermas menawarkan "model non-selektif," yang menunjukkan bagaimana berbagai sektor perlu "dicerahkan" untuk mencapai masyarakat yang komunikatif. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya bersifat komunikatif, dan perubahan sosial ditentukan bukan hanya oleh perkembangan teknologi atau produksi, tetapi juga oleh proses pembelajaran dalam dimensi praktis dan etis (Verovšek & Burdman, 2024). Teknologi dan faktor objektif lainnya hanya akan berdampak pada masyarakat jika diintegrasikan ke dalam tindakan komunikatif, yang memiliki logika tersendiri. Dalam setiap komunikasi, beberapa poin penting untuk digarisbawahi, antara lain *lebenswelt* (Jerman), *lifeworld* (Inggris), atau diartikan sebagai dunia kehidupan. "*Lebenswelt or lifeworld, to begin with as the correlate of processes of reaching understanding. Subjects acting communicatively always come to an understanding in the horizon of a lifeworld. Their lifeworld is formed from more or less diffuse, always unproblematic, background convictions. This lifeworld background serves as a source of situation definitions that are presupposed by participants as unproblematic*" (Habermas, 1984). Singkatnya *lebenswelt* adalah latar belakang komunikasi yang diandaikan begitu saja dan sifatnya pra-reflektif, bahkan pra-sadar, tapi nyata-nyata menuntun cara berkomunikasi manusia.

Menurutnya, praksis bukanlah sikap naluri melainkan tindakan mendasar manusia sebagai makhluk sosial. Praksis adalah dasar dari kesadaran rasional. Rasionalitas dapat muncul tidak hanya dalam tindakan menaklukkan alam melalui bekerja, namun juga dalam interaksi intersubjektif yang tercermin dalam bahasa sehari-hari. Menurut Habermas, teori tindakan komunikatif penting karena tujuan politiknya adalah mencapai kesepakatan secara rasional, bukan sekadar berkompromi atas perbedaan pendapat. Oleh karena itu, keadaan ini menunjukkan tingkat rasionalitas suatu masyarakat, yaitu masyarakat berkomunikasi dengan memberikan argumentasi yang rasional. Kelanjutan dari komunikasi dapat melahirkan tindakan penerimaan politik yang merupakan kesepakatan dalam debat publik atas sebuah pandangan untuk melahirkan konsensus. Terkadang tidak semua berujung pada konsensus tapi juga disensus ketika terjadi kritik yang tak melahirkan kesepakatan (Chriss, 2022).

Terdapat tiga tipe diskursus dalam kehidupan sehari-hari, antara lain; diskursus teoretis, diskursus praktis, dan diskursus kritis (Cooke, 2020). Diskursus teoretis dapat dijelaskan sebagai percakapan argumentatif tentang persoalan-persoalan yang bersifat faktual untuk menguji fakta dan menghasilkan klaim kesahihan. Berbeda dari diskursus teoretis, diskursus praktis terjadi apabila yang menjadi permasalahan adalah norma. Adapun yang terjadi dalam diskursus kritis, para kritikus itu memberikan pandangan dan tidak memerlukan konsensus atau kesepakatan.

Ada empat jenis klaim kesahihan dalam diskursus teoritis (O'Mahony, 2021), yaitu:

- Klaim kebenaran (*truth*), yaitu kesepakatan mengenai dunia yang alamiah dan objektif.
- Klaim ketepatan (*rightness*), yaitu kesepakatan mengenai norma-norma dalam dunia sosial.
- Klaim autensitas atau kejujuran (*sincerity*), yaitu kesepakatan mengenai kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang.
- Klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*), yaitu bentuk rekonsiliasi dari semua klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran.

Selanjutnya dalam membangun komunikasi, kritik memiliki peran penting. Habermas membagi dua jenis kritik, yaitu kritik estetis dan kritik terapis. Kritik estetis mempersoalkan kesesuaiannya dengan penghayatan dunia batiniah. Di sini argumen mempunyai peran yang unik, seperti membuka mata para pihak, yakni mengarahkan mereka pada persepsi estetis. Adapun kritik terapis adalah upaya untuk menyingkap penipuan-diri atau ilusi yang berada dalam pemikiran masing-masing pihak yang berkomunikasi. Ada upaya persuasif agar lawan diskusi mampu melihat ketidaktulusan dalam berekspresi atau berargumen sehingga mau berubah dan menyadari hal tersebut (Habermas, 1984). Disebut "terapoitis" yang asal katanya "terapi" adalah berupaya untuk menyembuhkan masyarakat dari jenis penindasan pengetahuan. Misalnya, aktivis lingkungan mengkritisi eksploitasi alam yang dilakukan oleh suatu perusahaan namun kritik tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh pemerintah. Pembiaran ini dapat mengindikasikan atau melahirkan kecurigaan akan adanya kerjasama politis antara perusahaan dan pemerintah. Di dalam berkomunikasi, ada beberapa istilah yang diangkat (Habermas, 2001) yaitu:

- Dunia objektif: sebagai jumlah seluruh entitas yang memungkinkan untuk membuat proposisi yang benar;
- Dunia sosial: sebagai totalitas dari semua hubungan interpersonal yang diatur secara sah; dan
- Dunia subjektif: sebagai jumlah pengalaman yang dapat diakses secara istimewa oleh pembicara.

Dalam berkomunikasi hendaknya setiap anggota memiliki hak yang sama dan setara sehingga setiap orang mampu menyampaikan argumen dengan merdeka. Dunia subjek dan dunia objek bertemu untuk membicarakan kepentingan dunia sosial. Oleh karenanya, setiap orang harus menjadi komunikan yang terbuka dan menghormati pihak lainnya. Yang dikedepankan dalam berargumen adalah pemikiran yang disampaikan harus rasional. Semakin rasional argumen maka pastinya akan semakin sulit untuk dibantah. Namun, harus disadari bahwa tema yang dibicarakan adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk ambisi tertentu. Dalam berdialog, sikap terbuka dan empati kepada yang lain harus dikedepankan sehingga tidak terjadi erosi makna dalam *lifeworld* yang diakibatkan oleh hasrat ingin menguasai/memenangkan perdebatan.

Habermas berpendapat bahwa kekuasaan itu tidak seharusnya dilegitimasikan, akan tetapi dirasionalisasikan. Rasionalisasi yang dimaksud bukan dalam paradigma kerja, tetapi paradigma komunikatif (Zakiah et al., 2024). Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan perkembangan politis, termasuk mengarahkan perkembangan kemajuan masyarakat. Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek pasif dari sistem administrasi dan ekonomi, melainkan subjek aktif yang membangun solidaritas budaya atau komunitas. Konsekuensinya, dalam proses modernisasi golongan yang tradisional/lokal tidak mesti tercerabut dari akar budayanya.

Analisa Komparatif

Selalu menarik membuat jembatan pemikiran antara filsafat Barat dan Timur. Keduanya adalah entitas yang tidak bisa dibuat hierarchy atau diperbandingkan menjadi yang lebih tinggi dan lebih rendah, sebab setiap pemikiran tumbuh subur dari lingkungan, budaya, dan sejarahnya. Seharusnya berbagai entitas epistemologi yang ada saling mengisi dan mengoreksi satu sama lain serta tidak memaksakan satu paham kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran yang ada di dunia. Penindasan yang sering kali bersembunyi di balik pengetahuan dapat dieliminir di dalam tindakan berkomunikasi sehingga setiap individu dapat mengetahui perkara dengan jelas dan mendapatkan kemerdekaan berbicara untuk menyampaikan pendapat. Dalam komunikasi/musyawarah segala persoalan dibuka sehingga tidak ada yang tertutupi. Keterbukaan itu menjadikan setiap individu tidak terjebak di dalam labirin berita palsu.

Kemerdekaan berpendapat merupakan yang esensi dalam berdemokrasi. Artinya, hak individu dihargai dan tidak dihalangi oleh mereka yang merasa memiliki kuasa. Kemudian dengan dipenuhinya hak, maka hasil consensus yang menjadi kesepakatan dijalankan bersama (Repucci & Slipowitz, 2021). Dalam praktik demokrasi dewasa ini, dimana rakyat memilih perwakilan yang duduk di majelis untuk berjuang memenangkan aspirasinya. Rakyat hanya hadir sebagai rakyat ketika berada di dalam bilik suara. Namun, perwakilan yang duduk di majelis seringkali tidaklah berjuang untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan pribadi atau partainya. Ruang publik yang menjadi arena untuk pertarungan opini menjadi tidak steril dari kepentingan, sebab orang dengan bebas mengakses ruang publik untuk menyebarkan opini yang dimanipulasi agar dapat meraih suara konstituen.

Khususnya di era teknologi internet dan media yang begitu canggih, ruang publik menjadi begitu luas terbuka. Setiap orang dapat mengakses ataupun menjadi publicness. Namun, seringkali informasi yang disampaikan adalah hal-hal yang manipulatif. Cara pandang masyarakat dengan mudah diarahkan oleh yang berkepentingan. Namun juga masyarakat yang terlibat dalam perdebatan opini public pun terkadang telah terpapar pemikirannya tanpa upaya filterisasi. Ini yang dikritik dalam teori krisis sebagai cara berdogma orang modern, yang tampak kritis di permukaan namun juga sebenarnya berdogma dan mengalami krisis makna. Pengetahuan menjadi begitu ensiklopedik namun tidak mendalam bahkan meaningless.

Sistem demokrasi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai ritual politik periodic, namun jauh lebih dari itu bahwa sistem ini berjalan secara simultan dan berkelanjutan demi mewujudkan suatu perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Selain itu, sistem ini adalah sebuah proses pendidikan dan pengembangan kualitas manusia di dalam kehidupan bersama (De Angelis, 2021).

PENUTUP

Membandingkan konsep musyawarah-mufakat ala Pancasila dan teori tindakan komunikatif Habermas menunjukkan corak pandangan dunia Barat dan Timur yang berbeda sekaligus memiliki persamaan. Boleh dikatakan bahwa teori komunikatif Habermas telah dipraktikkan di Nusantara melalui sistem musyawarah-mufakat yang dilandaskan rasa kekeluargaan. Dimana segala diskursus yang ada didialogkan bersama untuk kemudian bermufakat pada satu keputusan. Musyawarah sebagai bentuk komunikasi dan mufakat adalah hasil consensus bersama. Selain itu, kedua teori sangat terbuka pada perbedaan paradigma. Pengakuan pada keragaman paradigma sebagai keniscayaan yang tidak terbantahkan mengharuskan untuk mencari jalan tengah (dialog untuk menghasilkan konsensus) dalam mempertemukan berbagai kepentingan.

Perbedaan kedua pemikiran terlihat dari karakter budaya Barat dan Timur. Pada konsep musyawarah-mufakat Pancasila, ikatan komunal terasa sangat kental. Dengan asas kekeluargaan dan gotong-royong, masyarakat memandang setiap persoalan adalah persoalan bersama sehingga menuntut anggota masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Sedang dalam teori komunikasi Habermas, meski tujuan komunikasi adalah untuk kepentingan bersama, namun yang dikedepankan adalah kemampuan individu dalam menyusun argumen yang paling rasional sehingga dapat diikuti oleh individu lainnya sehingga tercipta konsensus.

Ada kelemahan di antara keduanya namun sekaligus bisa melengkapi satu sama lain. Menurut penulis, dengan paradigma pengetahuan yang begitu beragam, maka yang menjadi pertanyaan untuk teori tindakan komunikatif adalah paradigma mana yang paling rasional di antara semuanya? Disini muncul sebuah persoalan epistemologis, yaitu dalam menentukan ukuran kebenaran dan rasional. Terjadi ambiguitas dalam teori komunikatif Habermas, dimana di awal ada pengakuan terhadap berbagai paradigma sebagai suatu kenyataan namun pada akhirnya penentuan rasionalitas mengindikasikan adanya penetapan hierarki pemikiran. Hal ini masih menjadi tantangan berat bagi teori tindakan

komunikatif untuk bisa mengurai persoalan di era modern yang sarat dengan persoalan bahasa dan paradigma yang menjadi tempat bersembunyiya “kekuasaan”.

Adapun kelemahan pada musyawarah-mufakat Pancasila adalah ikatan kekeluargaan yang begitu kuat dalam komunitas dapat melahirkan consensus dari golongan mayoritas saja. Pasalnya, proses rasionalisasi dapat dengan mudah diinternalisasikan dalam diri masyarakat yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Namun, sebagaimana amanah para pendiri Republik Indonesia, bahwa kelima sila yang ada tidak berdiri sendiri namun terkait dengan sila lainnya. Agar tidak terjebak dalam otoritarianisme golongan, hendaknya manusia Indonesia memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah bahwa hidup untuk pengabdian kepada Tuhan dengan menjunjung kemanusiaan yang universal, merawat persatuan dari heterogenitas, melalui jalan musyawarah-mufakat yang dibimbing oleh hikmat dan kebijaksanaan demi tujuan keadilan sosial. Demi tujuan hidup bersama yang harmoni di dunia heterogen, maka perlu keterbukaan dan kesalingpengertian di antara manusia sebagaimana dua konsep yang ditawarkan pemikiran Barat dan Timur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chriss, J. J. (2022). Jurgen Habermas and Theory of Communicative Action. In *Goffman- Handbuch* (pp. 423–428). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05871-3_56
- Christensen, G. (2024). Three Concepts of Power: Foucault, Bourdieu, and Habermas. *Power and Education*, 16(2), 182–195. <https://doi.org/10.1177/17577438231187129>
- Cooke, M. (2020). Private Autonomy and Public Autonomy: Tensions in Habermas' Discourse Theory of Law and Politics. *Kantian Review*, 25(4), 559–582. <https://doi.org/10.1017/S1369415420000412>
- De Angelis, G. (2021). Habermas, Democracy and the Public Sphere: Theory and Practice. *European Journal of Social Theory*, 24(4), 437–447. <https://doi.org/10.1177/13684310211038753>
- Dorahy, J. F. (2022). A Subject-out-of-place: Reflections On the Recent Works On The Life and Legacies of Zygmunt Bauman. *Thesis Eleven*, 170(1), 136–145. <https://doi.org/10.1177/07255136221103927>
- Forchtner, B. (2021). Critique, Habermas and Narrative (genre): The Discourse-historical Approach in Critical Discourse Studies. *Critical Discourse Studies*, 18(3), 314–331. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1803093>
- Habermas, J. (1984). *Teori Tindakan Komunikatif*. MA Beacon Press. Habermas, J. (1991). *Transformasi struktural Ruang Publik*. MA The MIT Press. Habermas, J. (2001). *Teori Tindakan Komunikatif*. Kabalci Publishing House.
- Habermas, J. (2020). *Tasks of critical Theory in Society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429355301>
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mattulada. (1985). *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Gajah Mada University Press.
- Muqsih, A., Tajuddin, M. S., & Aderus, A. (2020). Negara Latoa: Tinjauan Bernegara Masyarakat Bugis dalam Lontara Latoa. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 136–154. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a6>
- O'Mahony, P. (2021). Habermas and the Public Sphere: Rethinking A Key Theoretical Concept. *European Journal of Social Theory*, 24(4), 485–506. <https://doi.org/10.1177/1368431020983224>
- Repucci, S., & Slipowitz, A. (2021). *Democracy Under Siege*. Freedom House.
- Smethurst, R., Young, A. G., & Wigdor, A. D. (2024). Jürgen Habermas Revisited via Tim Cook's Wikipedia Biography: A Hermeneutic Approach to Critical Information Systems Research. *Journal of Responsible Technology*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2024.100090>
- Soekarno. (1965). *Sebuah Otobiografi*. The Bobbs-Merrill Company.
- Suwarno, P. J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-yuridis Kenegaraan*. Penerbitan Kanisius.
- Verovšek, P. J., & Burdman, J. (2024). Between Habermas and Lyotard: Rethinking the Contrast between Modernity and Postmodernity. *Theory, Culture & Society*, 41(3), 71–88. <https://doi.org/10.1177/02632764231194483>
- Zakiah, Z., Agnia, R., Handayani, H. S., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. Z. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi dengan Legitimasi Kekuasaan dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik*, 3(2).